

## EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA DESA PATTONDONSALU KECAMATAN MAIWA KABUPATEN ENREKANG TAHUN 2018

<sup>1)</sup>Karmila, <sup>2)</sup>Muhammad Arisal Asad, <sup>3)</sup>Rahman Yakub

<sup>1)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

<sup>2)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

<sup>3)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sidenreng Rappang

[karmila@gmail.com](mailto:karmila@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pattondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tahun 2018. Populasi penelitian ini adalah populasi yang diambil berukuran besar dengan jumlah populasi 200 orang. Sampel diambil sebanyak 60 orang. Data diperoleh dengan pembagian kuesioner atau angket. Data yang diperoleh dari kuesioner tersebut selanjutnya diolah dengan analisis statistik deskriptif dengan program komputer SPSS.20. Hasil penelitian ini berdasarkan kriteria evaluasi dan dikategorisasikan berdasarkan pengkategorisasian Putra Eko Widjoko, evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pattondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tahun 2018 untuk kriteria efektivitas berada pada kategori sangat baik, kriteria efisiensi berada pada kategori baik, kriteria kecukupan berada pada kategori baik, kriteria pemerataan berada pada kategori sangat baik, kriteria responsivitas berada pada kategori sangat baik, dan kriteria ketepatan berada pada kategori sangat baik. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau referensi untuk penelitian yang sejenis, dan diharapkan pula dapat dikembangkan lebih lanjut untuk memperluas dan menambah pengetahuan baru sehingga hasil penelitian selanjutnya akan lebih baik.

Kata Kunci: Evaluasi, Kebijakan, Pengelolaan, dan Dana desa

### Abstract

*This study aims to determine the evaluation of village fund management policies in Pattondonsalu Village, Maiwa District, Enrekang Regency in 2018. The population of this study is a large population with a population of 200 people. Samples were taken as many as 60 people. Data was obtained by distributing questionnaires or questionnaires. The data obtained from the questionnaire was then processed by descriptive statistical analysis with the SPSS.20 computer program. The results of this study are based on evaluation criteria and are categorized based on the categorization of Putra Eko Widjoko, evaluation of village fund management policies in Pattondonsalu Village, Maiwa District, Enrekang Regency in 2018 for the effectiveness criteria are in the very good category, the efficiency criteria are in the good category, the adequacy criteria are in the very good category. Good, the alignment criteria are in the very good category, the responsiveness criteria are in the very good category, and the accuracy criteria are in the very good category. With this research, it is hoped that it can be taken into consideration or reference for similar research, and it is also hoped that it can be developed further to expand and add new knowledge so that the results of further research will be better.*

Keywords : Evaluation, Wisdom, Management, and Village Funds

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan secara umum pada hakekatnya merupakan proses perubahan yang terjadi secara terus-menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan pada norma-norma tertentu. Dalam hal ini, masyarakat merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan yang dilakukan diberbagai negara/daerah yang dilakukan oleh masyarakat terutama pemerintah dalam memberikan bimbingan, pengarahan, bantuan pembinaan, dan pengawasan agar dapat ditingkatkan kemampuan masyarakat dalam usaha menaikan taraf hidup dan kesejahteraannya. Kebijakan yang ada di daerah membutuhkan kesesuaian dengan keadaan yang nyata (real) kepada masyarakat lokal.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (on top) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

1. 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota.
2. 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota.
3. 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Sedangkan tingkat kesulitan geografis ditunjukkan oleh indeks kemahalan konstruksi. Berdasarkan besaran Dana Desa setiap kabupaten/kota, bupati/walikota menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap desa di wilayahnya. Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa setiap desa ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota. Kabupaten/Kota menghitung besaran Dana Desa untuk setiap desa berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka

kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis, dengan bobot:

1. 30% untuk jumlah penduduk desa
2. 20% untuk luas wilayah desa.
3. 50% untuk angka kemiskinan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap desa digunakan sebagai faktor pengali hasil. Tingkat kesulitan geografis ditentukan oleh faktor yang meliputi: ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi desa ke kabupaten/kota. Data jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis bersumber dari Badan Pusat Statistik. Dari beberapa penelitian terdahulu menjadi referensi bagi penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, namun terdapat perbedaan dari penelitian terdahulu yakni pada penelitian yang akan peneliti lakukan untuk mengetahui evaluasi kebijakan dalam pengelolaan dana desa di desa Pattondonsalu kecamatan Maiwa kabupaten Enrekang. Mengingat alokasi dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat demi tercapainya kesejahteraan dan pembangunan Di Desa Pattondonsalu kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang maka evaluasi kebijakan terhadap dana desa sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan, kepedulian serta partisipasi masyarakat dalam berbagai program pembangunan didesa. Oleh karna itu, peneliti tertarik untuk mengangkat judul penelitian "Evaluasi Kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tahun 2018"

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pattondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tahun 2018. Evaluasi merupakan alat dari berbagai cabang ilmu pengetahuan untuk menganalisis dan menilai fenomena ilmu pengetahuan dan aplikasi ilmu penegetahuan dalam penerapan ilmu pengetahuan dalam praktis profesi serta evaluasi dilakukan untuk mengukur/mengetahui bagaimana hasil terhadap kinerja kebijakan yang telah dibuat (Ridha,2016:113).

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta

individu. Kebijakan juga sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dan tindakan-tindakan yang terarah dan kebijakan juga merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan menunjukkan kesulitan-kesulitan dan kemungkinan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Taufiq, 2014:3). Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2008:185) evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan dan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan

Menurut Agustino (2008:188-189), fungsi evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

1. Evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai.
2. Evaluasi kebijakan berfungsi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target.
3. Evaluasi kebijakan berfungsi juga untuk memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk bagi perumusan maupun pada Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa, keuangan desa berasal dari pendapatan asli desa, APBD dan APBN (Widjaja, 2005:280).

Keuangan desa secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin. Transparan artinya dikelola secara terbuka; akuntabel artinya dipertanggungjawabkan secara legal; dan partisipatif artinya melibatkan masyarakat dalam penyusunannya. Disamping itu, keuangan desa harus dibukukan dalam sistem pembukuan yang benar sesuai kaidah sistem akuntansi keuangan pemerintahan. Sistem pengelolaan keuangan desa mengikuti sistem anggaran nasional dan daerah yaitu mulai 1 januari sampai 31 desember. Kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.

Oleh karena itu, kepala desa mempunyai kewenangan:

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang desa
3. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
4. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 dijelaskan bahwa "Pengelolaan Keuangan Desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa". Permendagri No. 20 Tahun 2018 Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Kepala desa dibantu oleh PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Kaur Keuangan.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan dana desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa. Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan dana desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan

bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Agar berbagai peraturan pelaksanaan undang-undang desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyalarsan dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemanfaatan dana desa. Untuk itu, Pemerintah merancang Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Rancangan SKB 4 Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada pemda kabupaten/kota, dan desa.

Dana desa dalam APBN ditentukan 10% dan di luar dana di transfer secara bertahap. Dana desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya adalah evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa di setiap tahapan pengelolaan dana desa tidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah.

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan penelitian secara kuantitatif. Metode Kuantitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi dan sampel tertentu, teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif statistik dengan tujuan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2014: 8).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara menggunakan teknik metode angket/kuesioner yang disebar/dibagikan ke 66 sampel yang telah diambil dari populasi.

Kuesioner merupakan suatu alat ukur yang dipergunakan untuk mengukur suatu kejadian yang digunakan oleh peneliti. Kuesioner dapat disebut sebagai kumpulan-kumpulan pernyataan yang digunakan untuk memperoleh sebuah informasi dari seseorang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan (Sugiyono, 2013). Kuesioner terdiri dari beberapa item pernyataan yang disusun dengan alternatif jawaban yang sudah disediakan, sehingga responden terpilih dapat memberikan jawaban sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya (Widi, 2011). Kuesioner yang diisi memuat pernyataan yang memuat mengenai poin-poin penting tentang evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Patondonsalu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang. Kuesioner yang diisi memuat pernyataan tertulis kepada responden untuk memperoleh informasi.

Kemudian metode Library research yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literature buku yang ada kaitannya dengan pembahasan masalah. Uji coba validitas kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana sebuah alat ukur dapat dipercaya dalam mengukur sesuatu hal. Dimana apabila nilai korelasinya menunjukkan nilai yang signifikan maka instrumen tersebut dapat dikatakan valid (Heale & Twycross, 2015 :67).

Uji validitas adalah pengujian yang dilakukan untuk mengukur ketepatan dan kecermatan suatu variabel terkait fungsinya dalam suatu penelitian (Azwar, 1986:47). Validitas dalam penelitian adalah derajat ketepatan alat ukur terhadap objek yang diukur (Sugiharto, 2009:21). Analisis uji validitas penelitian dilakukan dengan menggunakan program komputer SPSS versi 20 dengan metode Bivariate Pearson, atau korelasi produk momen Pearson, dari perhitungan korelasi didapatkan nilai koefisien korelasi setiap item tersebut. Kemudian untuk menentukan kelayakan item dalam kuesioner dilakukan uji signifikan koefisien korelasi. Menurut Azwar (1986:49), item dikatakan valid saat nilai signifikan korelasi lebih dari 0.05 (>0.05) yang kemudian disesuaikan dengan r tabel menurut jumlah responden.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan Teknik Statistic Deskriptif. Analisis Deskriptif Analisis deskriptif untuk menggambarkan kriteria efektivitas, efisiensi, kecukupan peralatan,

responsivitas, dan ketepatan pada evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa Pattondon Salu.

### C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh, maka evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pattondon Salu dikategorisasikan berdasarkan pengkategorisasian Putra Eko Widjoko (2012:115).

1. Kriteria Efektivitas. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh untuk kriteria efektifitas, sebaran nilai kriteria efektifitas berdasarkan kategori distribusi frekuensi. Terdapat 38 responden pada kategori sangat baik dengan persentase 63%, dan 22 responden pada kategori baik dengan persentase 37% dari jumlah total responden sebanyak 60 orang. Berdasarkan uraian diatas, bahwa rata-rata penilaian terhadap kriteria efektivitas kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tahun 2018 berada pada kategori sangat baik.
2. Kriteria Efisiensi. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh untuk kriteria efisiensi, dapat diperoleh sebaran nilai kriteria efisiensi berdasarkan kategori distribusi frekuensi yaitu terdapat 21 responden pada kategori sangat baik dengan persentase 35%, dan 39 responden pada kategori baik dengan persentase 65% dari jumlah total responden sebanyak 60 orang. Berdasarkan uraian diatas, bahwa rata-rata penilaian terhadap kriteria efisiensi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tahun 2018 berada pada kategori baik.
3. Kriteria Kecukupan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh untuk kriteria kecukupan, diperoleh sebaran nilai kriteria kecukupan berdasarkan kategori distribusi frekuensi. Terdapat 17 responden pada kategori sangat baik dengan persentase 28%, 42 responden pada kategori baik dengan persentase 70% dan 1 responden pada kategori cukup dengan persentase 2% dari jumlah total responden sebanyak 60 orang. Berdasarkan uraian diatas, bahwa rata-rata penilaian terhadap kriteria kecukupan kebijakan pengelolaan dana desa di Desa

Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tahun 2018 berada pada kategori baik.

4. Kriteria Perataan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh untuk kriteria perataan, diperoleh sebaran nilai kriteria perataan berdasarkan kategori distribusi frekuensi. Terdapat 31 responden pada kategori sangat baik dengan persentase 52%, dan 29 responden pada kategori baik dengan persentase 48% dari jumlah total responden sebanyak 60 orang. Berdasarkan uraian diatas, bahwa rata-rata penilaian terhadap kriteria perataan kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tahun 2018 berada pada kategori sangat baik menurut pengkategorisasian Putra Eko Widjoko (2012:115).
5. Kriteria Responsivitas. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh untuk kriteria responsivitas, diperoleh sebaran nilai kriteria responsivitas berdasarkan kategori distribusi frekuensi. Terdapat 39 responden pada kategori sangat baik dengan persentase 65%, dan 21 responden pada kategori baik dengan persentase 35% dari jumlah total responden sebanyak 60 orang. Berdasarkan uraian diatas, bahwa rata-rata penilaian terhadap kriteria responsivitas kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tahun 2018 berada pada kategori sangat baik.
6. Kriteria Ketepatan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif yang diperoleh untuk kriteria ketepatan, diperoleh sebaran nilai kriteria ketepatan berdasarkan kategori distribusi frekuensi. Terdapat 23 responden pada kategori sangat baik dengan persentase 38%, 35 responden pada kategori baik dengan persentase 58%, dan 4 responden pada kategori cukup dengan persentase 4% dari jumlah total responden sebanyak 60 orang. Berdasarkan uraian diatas, bahwa rata-rata penilaian terhadap kriteria ketepatan kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tahun 2018 berada pada kategori sangat baik.



#### D. KESIMPULAN

Kesimpulan dari hasil penelitian ini berdasarkan kriteria evaluasi dan dikategorisasikan berdasarkan pengkategorisasian Putra Eko Widjoko, evaluasi kebijakan pengelolaan dana desa di Desa Pattondon Salu Kecamatan Maiwa Kabupaten Enrekang Tahun 2018 untuk kriteria efektivitas berada pada kategori sangat baik, kriteria efisiensi berada pada kategori baik, kriteria kecukupan berada pada kategori baik, kriteria perataan berada pada kategori sangat baik, kriteria responsivitas berada pada kategori sangat baik, dan kriteria ketepatan berada pada kategori sangat baik.

#### E. REFERENSI

- Heale, R, Twycross. (2015). Validity and reliability in quantitative studies. *EvidenceBased Nursing*, 18(3), 66–67. <https://doi.org/10.1136/eb-2015-102129>.
- Agustino, L. (2008). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV Alfabeta.
- Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ferdinand, A. (2006). *Metode Penelitian Manajemen : Pedoman Penelitian untuk Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi Ilmu Manajemen*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Nuryani. ., N. (2019). Validity and Reliability Questionnaire of Knowledge , Attitude and Practice of Balanced Diet among Adolescent. *Gizi Dan Kesehatan*, 3(2), 37– 46.
- Ramdani, A. M. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol. 11 No.01.
- Siregar, S. (2006). *Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Siregar, S. (2013). *Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Suaib, M. R. (2016. ). *Pengantar Kebijakan Publik, Dari Administrasi Negara, Kebijakan Public, Administrasi Publik, Good Governance Hingga Implementasi Kebijakan*. . Yogyakarta: Calpulis.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: AlfaBeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Taufiqurokhman. (2014). *Kebijakan Publik*. Jakarta: FISIP Universitas Maestopo Beragama.
- Wahab Abdul, S. (2008). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Widjaja, H. (2005). *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Widjoko, E. P. (2012). *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, B. (2007). *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Persada.